

Pernyataan Informasi Terkait Kelengkapan Dokumen LHKPN Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Sebagai bentuk komitmen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), kami secara rutin melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses penyampaian dan publikasi LHKPN Direksi terbaru pada tahun 2025, terdapat beberapa dokumen pendukung yang **masih dalam tahap verifikasi dan kelengkapan administratif oleh pihak terkait**. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme normal untuk memastikan seluruh data yang dilaporkan telah lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk segera memutakhirkan dan melengkapi dokumen dimaksud, serta akan memperbarui informasi pada laman resmi PPID Telkom setelah seluruh proses verifikasi selesai dilakukan.

Kami terus memastikan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dijalankan secara bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi serta etika pengelolaan informasi di lingkungan perusahaan.

Atas perhatian dan pengertian dari seluruh pemangku kepentingan, kami sampaikan terima kasih.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIREKTORAT GROUP BUSINESS DEVELOPMENT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HONESTI BASYIR
2. Jabatan : DIREKTUR GROUP BUSINESS DEVELOPMENT
3. NHK : 107501

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **53.600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/201 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 747 m2/400 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
6. Tanah Seluas 1.306 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 298 m2/300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 717 m2/250 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 690 m2/115 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000
11. Bangunan Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG



SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

2.650.000.000

1. MOBIL, MINI COOPER CABRIOLET Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 750.000.000
2. MOBIL, MINI COOPER CLUBMAN AT Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, MINI COOPER CLUBMAN A/T Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000
4. MOBIL, MERCEDEZ BENZ CLS350 Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

1.725.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

14.395.202.240

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

13.859.661.447

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

86.229.863.687

III. HUTANG

Rp.

12.192.139.222

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

74.037.724.465

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : PT. TELKOM INFRA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANANG HENDARNO**
2. Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**
3. NHK : **206603**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **10.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/158 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
2. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. Bangunan Seluas 37 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.750.000.000
5. Bangunan Seluas 74 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
6. Bangunan Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **2.540.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ EQE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
3. MOBIL, WULING AIR EV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **749.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	86.208.536
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.577.985.770
F. HARTA LAINNYA	Rp.	16.169.049.082
Sub Total	Rp.	38.922.243.388
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	38.922.243.388

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 September 2020/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIREKTORAT DIGITAL BUSINESS
SUB UNIT KERJA : DIGITAL BUSINESS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FAIZAL ROCHMAD DJOEMADI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **156866**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 14.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/104 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/136 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.600.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI VULCAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, MECEDEZ BENZ GLE 250 D Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU LUXIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, MINI COOPER MINI COOPER Tahun 2018, HASIL



SENDIRI Rp. 450.000.000

5. MOTOR, YAMAHA TMAX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.0006. MOBIL, MECEDEZ BENZ GE 280 Tahun 1989, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 4.700.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 9.695.483.971**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.191.721.849**F. HARTA LAINNYA** Rp. 1.120.000.000**Sub Total** Rp. 36.807.205.820**III. HUTANG** Rp. 2.586.817.801**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 34.220.388.019

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 Oktober 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.